

**BAB I**

**KONTROVERSI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

**PRIVATISASI**

**A. Latar Belakang Masalah**

Realitas ekonomi-politik yang terjadi saat ini, menyorongkan fakta bahwa berbagai kebijakan Privatisasi, di ranah ekonomi, sangat erat kaitannya dengan fenomena yang menjadi mainstream dari globalisasi. Privatisasi merupakan pintu masuk bagi implementasi pemikiran globalisasi di ranah ekonomi, Sebab Privatisasi dalam hal ini berfungsi sebagai : *pertama*, instrumen kebijakan yang meredusir peran negara secara sistematis dalam wilayah ekonomi. Negara, melalui kebijakan privatisasi, digerus peranannya dalam proses produksi dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat barang maupun jasa. Selanjutnya, dengan alasan untuk menciptakan kestabilan pasar, negara, kemudian, diberi atribut sebagai regulator dalam proses transaksi ekonomi. *Kedua*, privatisasi merupakan instrumen yang berfungsi sebagai pembuka katub liberalisasi secara global. Melalui privatisasi secara ekonomi, peluang terbukanya institusionalisme pasar domestik jelas lebih besar.<sup>1</sup>

Langkah kebijakan Privatisasi BUMN yang diambil oleh pemerintah Indonesia jelas mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan. Berbagai sikap pro dan kontra muncul ke permukaan sehingga mengharuskan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BUMN untuk lebih bersikap hati-hati dan

---

<sup>1</sup> M. Bak Adhi Ikhianto, dalam *Kritik Globalisasi Dan Neoliberalisme 2011*, Fisiol UGM, 2006

serius dalam menanganinya. Berbagai argumen datang dari beberapa ahli dan praktisi ekonomi yang menyatakan ikut mendukung langkah tersebut dengan mempertimbangkan unsur bisnis dan manajerialnya, misalnya Frans Seda, Dorodjatun, Budiono, Laksamana Sukardi, dan Indra Bastian. Mereka lebih cenderung menggunakan paradigma neoliberal sebagai basis untuk menempatkan kebijakan privatisasi BUMN dalam peta kebijakan ekonomi nasional.

Di pihak lain, ada beberapa ahli juga memiliki pendapat yang berbeda dengan para tokoh di atas. Misalnya saja dua pakar ekonomi politik seperti James Petras dan Henry Veltmeyer, kedua tokoh tersebut menyatakan menolak Privatisasi BUMN berdasarkan pengalaman di Amerika Latin (Petras dan Veltmeyer, 2002). Penolakan terhadap kebijakan ini juga datang dari Mansour Fakih dan Revrison Baswir. Tokoh-tokoh ini jelas sangat berbeda dengan para tokoh yang di atas, tokoh ini cenderung berhaluan sosialis, sehingga perbedaan mereka dalam hal menempatkan kebijakan Privatisasi BUMN sangatlah signifikan.

### **Kelompok Pro Privatisasi**

Privatisasi yang dilakukan di Indonesia dianggap oleh para penganjur kebijakan ini sebagai suatu solusi terbaik yang mampu menjawab kebuntuan ekonomi saat itu, dimana privatisasi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memulihkan kepercayaan internasional serta menopang defisit anggaran dan menyehatkan sektor Telekomunikasi kita untuk pengembangan sektor publik yang lebih efisien. Privatisasi secara umum dalam pandangan kelompok ini adalah

1. ... untuk memindahkan status kepemilikan BUMN

atau kekayaan publik lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal perseorangan,<sup>2</sup> dengan memberikan berbagai fasilitas yang memudahkan jalan pihak swasta dalam mengambil alih perusahaan-perusahaan Negara. Disadari atau tidak Pola inilah yang menjadi konsekuensi dari trend fenomena global, dimana sistem ekonomi yang terpusat pada Negara (state-centered-economic-system) ditransformasi menjadi suatu sistem ekonomi yang berpusat pada mekanisme pasar bebas (free market economic system).

Konsekuensi dari pengertian privatisasi seperti itu bagi kegiatan ekonomi adalah terjadinya minimalisir peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan juga seperti apa yang dikatakan oleh Petras dan Veltmeyer bahwa Privatisasi BUMN sesungguhnya hanyalah salah satu unsur saja dari agenda besar liberalisasi ekonomi dalam arti seluas-luasnya. Di Inggris pada tahun 1979 dengan terpilihnya Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri, dengan perlahan roda ekonomi Inggris pun secara drastis berubah haluan, politikus dari aliran kanan ini (the New Right) sangat antusias memperjuangkan pasar bebas dan dengan tegas juga berseberangan dengan konsep Negara intervensionis. Thatcherisme atau yang biasa disebut gerakan pembaruan Thatcher diklaim mampu mendongkrak roda perekonomian inggris waktu itu yaitu dengan mengubah posisi BUMN inggris dari membebani keuangan negara karena rugi dan subsidi sekitar tiga milyar poundsterling per tahun, menjadi penghasil pajak terbesar.

Para penganut pro kebijakan privatisasi selalu menjadikan keberhasilan pelaksanaan privatisasi di Inggris dan Amerika sebagai acuan dalam upaya untuk

---

<sup>2</sup> *Revisi dan Revisi dalam Neoliberalisme*, hal 206, Cindelas, 2002

menarik perhatian serta keyakinan baik itu pakar ekonomi maupun jajaran pemerintahan di berbagai Negara di dunia terhadap program privatisasi ini. Mereka mencontohkan program privatisasi dan deregulasi sebagai kebijakan penting yang menghubungkan langsung publik dengan sektor privat. Seperti pada kasus privatisasi sektor transportasi di AS, pemerintah menerapkan kebijakan privatisasi bertahap dan sedikit demi sedikit dalam kontrak angkutan. Kebijakan tersebut diklaim mampu menghemat biaya dan produktivitas yang mendorong inovasi pelayanan.<sup>3</sup> Penganut neoliberal juga yakin bahwa privatisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan suatu negara untuk menerobos celah liberalisasi perekonomian menuju pembangunan kerjasama di segala sektor.

Privatisasi menurut mereka dilakukan dalam bingkai efisiensi, penyehatan, dan pemberantasan korupsi dalam tubuh BUMN. Ketidakefisienan dan praktek korupsi yang subur dalam tubuh BUMN dikatakan sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan Negara dalam mengakomodasi tuntutan publik yang semakin besar seiring dengan perkembangan yang dihadapi dalam tubuh pemerintah itu sendiri, ditambah lagi dengan kampanye besar-besaran yang dilakukan Bank Dunia mengenai pentingnya privatisasi BUMN untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, keseluruhan dunia dengan menyebarkan empat keburukan BUMN, yaitu boros finansial; jumlah kredit yang tidak proporsional akibat permainan politik; tidak ramah lingkungan; dan tidak ada kontribusi fiskal yang positif bagi Negara ketika BUMN dipegang oleh birokrat. Hasil kampanye

---

<sup>3</sup> *Journal of Economic Surveys*, Vol. 17, No. 4, December 2003, pp. 479-510.

Bank Dunia ini akhirnya menelurkan sebuah kesepakatan internasional untuk mereformasi BUMN melalui privatisasi.

Kelompok pro privatisasi ini jelas mendapatkan suatu legitimasi yang kuat ketika mereka berpendapat dalam melihat sejarah kelahiran privatisasi, karena sejarah lahirnya kebijakan privatisasi ini tidak terlepas dari faktor mudarnya keyakinan sosialis yang mengatakan bahwa pengelolaan Negara disegala bidang bisa membawa kemakmuran bersama. Maka dari itu, sebagai konsekuensinya, tampillah kapitalisme sebagai pemenang dalam perang ideologis antara sosialisme versus kapitalisme yang kemudian dalam perkembangannya menjadi fondasi utama lahirnya perspektif neoliberalisme.

Bagi Norena Hertz, perspektif neo-liberal ini muncul ketika doktrin Keynesian terbukti tidak berdaya menghadapi perubahan yang terjadi pada akhir tahun 1973, ketika Negara-negara Arab membentuk sebuah kartel, OPEC, dan menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi.<sup>4</sup> Kondisi ekonomi baru yang dipicu oleh krisis minyak jelas membutuhkan suatu konsep baru dalam mengelola perekonomian. Sejak saat itulah perspektif Keynesian (*big government*) yang merupakan salah satu perspektif liberal yang percaya pada kekuatan Negara dalam mengatur segala hal termasuk mengatur pasar tergantikan dengan perspektif neo-liberal. Perspektif neo-liberal menuntut adanya pengurangan peran Negara dalam segala hal dan penambahan seluas-luasnya bagi kekuatan pasar agar pemerintah dapat lebih fokus dalam melakukan pekerjaan dalam lingkup pemerintahannya saja.

---

<sup>4</sup> Norena Hertz, *Multinational Globalization*, Yogyakarta, 2002, hal. 10

Berdasarkan cara pandang kelompok pro privatisasi terhadap faktor-faktor kelahiran privatisasi diatas, mulai dari sejarah keberhasilannya dan berbagai cerita buruk dalam tubuh BUMN, mereka kemudian beranggapan bahwa reformasi BUMN harus dilakukan dengan menitik beratkan pada kebijakan privatisasi sebagai salah satu content dalam reformasi BUMN dan itu tidak dapat ditawar lagi.

Pada permulaan krisis di Thailand, 2 Juli 1997 yang berimbas pada menurunnya nilai mata uang baht terhadap dolar AS, dari 24,7 baht per dolar menjadi 29,1 baht per dolar AS, yang kemudian juga diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya, seperti Filipina, Malaysia, Korsel dan Indonesia,<sup>5</sup> di perkirakan hampir semua negara-negara ini memiliki kondisi dalam struktur perekonomiannya tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian Thailand.

Krisis yang terjadi di beberapa negara tersebut khususnya di Indonesia berdampak pada pelarian modal-modal asing serta kehancuran sistem perbankan, sehingga pertumbuhan di sektor riil dan dunia usaha sangat sulit untuk dikembangkan, tidak terkecuali juga bagi kegiatan-kegiatan bisnis ikut mengalami kemacetan. Badan usaha yang terutama berskala besar milik para konglomerat mengalami kesulitan yang teramat parah, yang pada umumnya karena beban hutang dalam valuta asing (forex) yang sangat memberatkan.<sup>6</sup> Walaupun utang luar negeri Indonesia cukup tinggi (Juli 1997; US \$54 Milyar), IMF, Bank Dunia dan Pemerintah RI yakin, bahwa data fundamental Indonesia sehat. Berangkat

<sup>5</sup> BJ. Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan*, The Habibie Centre, 2006.

<sup>6</sup> Lihat, *Implementasi Privatisasi BUMN dan pengaruhnya terhadap nasionalisme*, [www. Google.com](http://www.Google.com) (13/9/2005). Diakses tanggal 12/1/2007

dari persoalan diatas, pemerintah Indonesia merasa tidak sanggup mengurus sendiri berbagai situasi yang melanda bangsa ini mulai dari anjloknya Rupiah pada minggu kedua di bulan juli, dari 2.432 per dolar AS menjadi sekitar 3.000 dan pada januari '98 menjadi 5.097 per dolar,<sup>7</sup> ditambah lagi dengan kondisi perbankan yang tidak menunjukkan peningkatan dalam mendorong pelaku usaha untuk bangkit lebih maju, maka pada 8 oktober '97 pemerintah mengambil langkah dengan meminta bantuan IMF untuk bekerjasama dalam pemulihan ekonomi, sebagai salah satu upaya mencari jalan keluar dari krisis. Langkah pemulihan ekonomi ini dilakukan atas pertimbangan dan saran dari IMF.

Persetujuan IMF dengan pemerintah Indonesia sebagai mitra dalam pemulihan ekonomi nasional dijawantahkan melalui penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* yang diturunkan dalam beberapa point penting dalam *SAP (Struktural Adjustment Program)*. Sejak ditanda tangannya *LoI* itu, Indonesia masuk kedalam *SAP* dan pengawasan dari IMF. Pokok-pokok penting dari program IMF yang dituang kedalam *Letter of Intent (LoI)* dan menjadi program penyesuaian struktural antara lain : Restrukturisasi Lembaga-lembaga keuangan, penghematan anggaran belanja, Privatisasi BUMN serta liberalisasi perdagangan dan deregulasi.

Jika kita melihat kebelakang, khususnya kebijakan privatisasi BUMN di sektor telekomunikasi yang dilakukan pemerintah selama ini bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran yang terdapat pada APBN. Bila langkah itu tidak

berupaya menutupnya dengan mencari sumber pendanaan dari sektor lain.

Sebagaimana tercantum dalam LoI, selama lima tahun keberadaan IMF di Indonesia (1998-2002), pemerintah dan IMF sepakat untuk melego sekurang-kurangnya 16 BUMN. Beberapa diantaranya adalah PT Pupuk Kaltim, PT Kimia Farma, PT Telkom, PT Indosat, dan PT Semen Gresik. Dari hasil privatisasi ke 16 BUMN tersebut, pemerintah berharap dapat menerima tambahan pemasukan negara sebesar rata-rata Rp 6,5 triliun per tahun.<sup>8</sup>

Maka dari itu, kelompok pro privatisasi menganjurkan beberapa langkah pemerintah untuk melakukan reformasi BUMN dengan melakukan restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi BUMN. Profitisasi merupakan peningkatan secara agresif dan efisien bagi perusahaan sehingga mencapai suatu profitabilitas dan surplus yang maksimal bagi perusahaan. Sementara restrukturisasi adalah upaya untuk peningkatan kesehatan perusahaan dan pengembangan kinerja usaha. Sedangkan Privatisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai dari perusahaan (value creation) baik dengan meningkatkan leverage asset yang dimiliki, teknologi, serta kapabilitas dalam persaingan pasar dan / atau dengan melibatkan pihak swasta dalam pemilikan BUMN,<sup>9</sup> Ketiga kebijakan dan langkah untuk mereformasi BUMN tersebut mengindikasikan bahwa dibutuhkannya suatu peningkatan kualitas SDM melalui tingkat kesadaran yang tinggi terhadap produktivitas, profesionalisme, kreativitas / perilaku efisien kualitas produksi dan layanan yang prima (enterpreunership), juga adanya otoritas dan otonomi yang cukup yang diiringi dengan perubahan sikap aparat pemerintah untuk

---

<sup>8</sup> Revrisond Baswir, hal 209.

<sup>9</sup> *Value Based Management* dalam jurnal tentang privatisasi sektor telekomunikasi [www.google.com](http://www.google.com)

memperlakukan BUMN sebagai layaknya suatu “korporasi” serta melepaskan BUMN dari beban pemerintah. Dengan begitu, privatisasi seharusnya mempunyai tujuan jangka panjang, maksudnya hasil dari privatisasi BUMN diharapkan, selain untuk menutup kekurangan APBN, juga dapat memotong biaya-biaya (beban) krisis sehingga pemulihan dapat segera berlangsung. Akan tetapi ketika privatisasi hanya dimaksudkan untuk meraih target jangka pendek, maka sasaran perubahan yang sebenarnya yaitu untuk memulihkan perekonomian dari krisis, justru tidak akan tercapai.<sup>10</sup>

### **Kelompok Kontra Privatisasi**

Argumen tentang privatisasi menurut pandangan dari perspektif neoliberal diatas mendapat tanggapan keras dari para pemikir sosialis yang mengetahui adanya tendensi terselubung dari salah satu instrumen neoliberal yang bernama privatisasi ini. James Petras dan Henry Veltmeyer sebagai salah satu pendukung yang kontra terhadap privatisasi, menyatakan bahwa privatisasi bukanlah sebuah fenomena parsial dari kondisi lokal dalam waktu tertentu, akan tetapi privatisasi berpangkal dari kerakusan kekuasaan imperial ekonomi dan harus dipahami sebagai bagian dari strategi global yang bermaksud menyerang masyarakat sipil dan politik demokrasi, serta melakukan intervensi militer dengan kekerasan dan penggunaan dekrit-dekrit eksekutif yang sewenang-wenang.<sup>11</sup>

Sejarah bermulanya privatisasi sebenarnya tidak hanya dilihat dari konteks pergeseran paradigma dalam suatu kurun waktu tertentu atau dari kinerja pemerintah saja, apalagi sebagai suatu usaha untuk penyehatan, efisiensi ataupun

---

<sup>10</sup> Lihat, Tanri Abeng, *Reformasi BUMN*, [www.goole.com](http://www.goole.com) (28/6/2000), diakses tanggal 12/1/2007

pemberantasan korupsi, akan tetapi pangkal tolak kebijakan privatisasi justru terletak pada keputusan aktor-aktor transnasional untuk mengekspansikan usahanya melalui cara-cara diatas.<sup>12</sup> Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang kelompok ini, privatisasi sebagai sebuah kebijakan sudah bermasalah dari perumusannya, apalagi pada tahap implementasinya.

Jika privatisasi bermula dari hal tersebut, definisi privatisasi yang dikemukakan oleh kelompok ini jelas berbeda dari kelompok sebelumnya, dengan lebih terfokus pada apa yang ada dibalik kebijakan privatisasi tersebut dan siapa yang mendapat apa.

Dengan demikian, privatisasi dapat disimpulkan sebagai suatu agenda sistem ekonomi neoliberal yang meliputi proses-proses dalam menuju penguatan sektor swasta, agenda politik yang dipaksakan, serta merupakan suatu keputusan politik yang menimbulkan efek ketergantungan melalui dampak kemiskinan dan kemerosotan ekonomi secara struktural, dan yang lebih ekstremnya adalah privatisasi merupakan suatu gerakan-gerakan anti kesejahteraan.

Secara parsial, penerapan paham neoliberalisme di Indonesia sudah berlangsung sejak 1980-an. Hal itu antara lain ditandai dengan dilakukannya kampanye besar deregulasi dan debirokratisasi pada pertengahan 1980-an, dimulainya liberalisasi keuangan tahun '87 dan '88, serta dimulainya privatisasi BUMN pada awal 1990-an.

Walaupun demikian, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif baru berlangsung setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada

tahun 1997.<sup>13</sup> Keterlibatan IMF (International Monetary Fund) dalam proses pemulihan ekonomi nasional berlangsung, dan sejak itu pula pemerintah kita dengan resmi mengimplementasikan perspektif neoliberal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelola ekonomi Indonesia agar bisa keluar dari krisis.

Pertanyaan yang paling mendasar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional adalah mengapa pemerintah mengambil langkah untuk memprivatisasi sejumlah BUMN yang sangat strategis dan apa tujuan dari IMF menyarankan agar pemerintah memprivatisasikan sejumlah BUMN. Sejumlah pertanyaan ini jelas sarat akan pelaksanaan agenda-agenda neoliberalisme di Indonesia.

Menurut Drajat Wibowo, privatisasi jika dilakukan dengan filosofi kebijakan dan strategi yang benar bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sebab privatisasi bertujuan utama meningkatkan efisiensi ekonomi, memperbaiki struktur pasar dan memperbesar kontrol publik. Akan tetapi jika dilakukan mirip dengan pedagang kelontong, privatisasi bisa sangat merugikan masyarakat. Privatisasi menjadi “asing-isasi” karena pembelinya cenderung dari orang asing. Banyaknya terdapat kesalahan-kesalahan dalam proses privatisasi khususnya pada kasus privatisasi Indosat, jelas mengindikasikan privatisasi yang dilakukan hanya untuk mengikuti saran dari IMF saja ini terbukti dengan, *Pertama*, Privatisasi Indosat dan BUMN lainnya dipaksakan tanpa adanya Undang-Undang privatisasi. Tidak adanya aturan mengenai BUMN mana yang sifatnya strategis yang harus tetap dimiliki masyarakat Indonesia, mana yang boleh dilepas ke pihak asing. *Kedua*, Privatisasi Indosat mengorbankan kepentingan strategis dan geopolitik

---

Indonesia karena Indosat ini mendapat akses terhadap koordinat dan pengelolaan satelit Palapa C3. *Ketiga*, secara fiskal dan finansial, transaksinya berpotensi merugikan negara. Memang, harga jual yang disepakati adalah RP 12. 950 per saham, tapi semua tahu bahwa harga dibursa adalah hasil dari penggorengan.<sup>14</sup> Inilah yang menjadi tanggapan keras para kelompok yang kontra terhadap privatisasi, karena melalui program-program dalam *SAP* hak-hak dan aset-aset yang semestinya dimiliki dan dikelola untuk kemakmuran rakyat, akan berubah menjadi kerugian dan kesengsaraan bagi rakyat.

Dalam bidang politik, ikatan kerjasama yang kuat antara monopoli swasta yang memperoleh keuntungan dari privatisasi dan pemerintah (juga terkadang disertai para anggota dewan) menjadi alasan pokok mengapa dewan legislative dan lembaga yudikatif menjadi pihak yang kalah dalam transisi menuju ekonomi pasar bebas. Lembaga-lembaga yang representatif dilampaui dalam proses transfer kekayaan Negara ke tangan-tangan swasta. Keputusan-keputusan besar diambil ditempat lain sementara parlemen paling jauh menanggapi keputusan-keputusan yang telah diambil tanpa ada daya dan upaya untuk menggagalkan keputusan yang telah berlaku walaupun sebenarnya keputusan tersebut cacat hukum. Hasil akhirnya, privatisasi berdampak pada melemahnya demokrasi dan hilangnya pengawasan legislatif terhadap sektor-sektor ekonomi penting. Perusahaan yang terprivatisasi tidak akan bertanggungjawab kepada komite atau badan-badan pengawas aktivitas perusahaan-perusahaan BUMN karena terikat dengan direktornya, apalagi terhadap otoritas publik.

---

<sup>14</sup> *Indosat: The Privatization of a National Asset*, p. 100.

Dengan kata lain, kebijakan privatisasi telah mereduksi atau bahkan menghilangkan peran Negara kesejahteraan sebagai pelindung masyarakat dan peran Negara demokrasi yang mempunyai otoritas politik. Sebagai gantinya privatisasi melepaskan kewibawaan pemerintah menjadi pelicin jalan swasta (secara struktural berada dibawah swasta dan dikendalikan oleh swasta) serta dilain pihak melepaskan masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan label konsumen yang diharap menjadi pasar yang menjanjikan (pola-pola konsumerisme).

Sementara bagi sektor pembangunan ekonomi nasional, privatisasi membawa dua dampak negatif. *Pertama*, privatisasi meniadakan sumber akumulasi ekonomi nasional yang menguntungkan, khususnya ketika para investor baru mengirim penghasilannya diluar negeri. *Kedua*, Negara kehilangan kendalinya yang sangat strategis untuk mengalihkan pendapatan ke sektor-sektor ekonomi baru yang dianggap tidak menghasilkan keuntungan tetapi bisa memiliki dampak positif bagi terbukanya peluang kerja dan area-area investasi baru, khususnya infrastruktur dan pendidikan.

Bagi para penganut neoliberal, mereka selalu berasumsi bahwa untuk memutus suatu tali kemiskinan di suatu negara dibutuhkan suatu bantuan (biasanya dalam bentuk utang luar negeri) dari luar sebagai suntikan modal. Dengan begitu otomatis pendapatan bertambah, secara tidak langsung juga kegiatan ekonomi akan berjalan dan investasi meningkat sehingga negara bisa save dari keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ekonomi untuk modal

berikutnya. Namun ternyata masalahnya adalah bahwa ini adalah pola pikir yang

negeri ini telah membawa suatu negara (khususnya negara-negara dunia ketiga) kedalam jurang kemiskinan dan ketergantungan.

Antara ketergantungan dan kemiskinan mempunyai suatu hubungan yang sangat erat. Alur Kemiskinan yang terjadi adalah sebagai berikut: apabila suatu negara sudah tidak mampu lagi membayar beban hutangnya (termasuk bunga), maka dari itu kebijakan privatisasi ditawarkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekosongan atau menutupi anggaran yang habis untuk biaya operasional dan untuk membayar hutang. Kebijakan tersebut jelas sangat dipaksakan karena asumsi yang terbangun adalah negara membutuhkan uang untuk membiayai segala aktivitas negara.

Apabila kondisi sosial politik, keamanan, dan kondisi makro-ekonomi yang belum kondusif pasti akan mempengaruhi minat investor dalam proses privatisasi BUMN dan secara otomatis pasti harga saham BUMN yang diprivatisasi akan jatuh pada hitungan rugi, disinilah letak keuntungan para pemilik modal asing karena membeli perusahaan nasional dengan harga yang sangat murah. Kalau perusahaan nasional yang ditargetkan tidak bisa terjual dengan harga yang tinggi dan tidak dapat menutupi anggaran dan menutupi hutang, maka permasalahan kekosongan anggaran dan hutang tidak akan terselesaikan.

Para penganut neoliberal yang sangat bersikeras untuk meminimalisir dan meminggirkan peran negara dari kompetisi pasar bebas dengan mereduksi peran-  
..... sebagai hanya sebagai regulator saja melalui privatisasi sebenarnya

bertentangan dengan semangat awal liberalisme. padahal menurut Adam Smith<sup>15</sup> seorang tokoh liberalisme klasik, pemerintah tetap diberi ruang gerak lewat penyelenggaraan tata-keadilan agar akumulasi kekayaan yang dilakukan oleh individu-individu tertentu tidak terlepas dari kaitannya dengan proses pembangunan suatu bangsa, bukan pada tujuan akumulasi kekayaan pribadi. Oleh karena itu, menurut Smith, untuk menciptakan kondisi tersebut pemerintah mempunyai tiga tugas penting: melindungi masyarakat dari segala bentuk kekerasan dan serbuan negara lain (karena pertahanan nasional lebih penting ketimbang kekayaan nasional), melindungi sejauh mungkin setiap warga negara dari ketidakadilan dan pemaksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga lainnya, serta tugas untuk mengadakan dan mempertahankan sarana dan prasarana publik dan berbagai lembaga publik yang ada bukan hanya bagi kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu. Dari dikesampingkannya peran negara tersebut, bisa dibayangkan bagaimana masyarakat tidak mempunyai proteksi yang sebenarnya menjadi tugas dari negara dalam berhadapan secara *vis a vis* dengan kekuatan transnasional apabila kebijakan privatisasi dilaksanakan.

Ketergesaan pemerintah untuk mengikuti apa yang menjadi suatu keberhasilan kebijakan privatisasi dan memutuskan untuk melaksanakan privatisasi bisa dilihat dalam fakta swastanisasi BUMN sektor telekomunikasi. Revolusi sektor telekomunikasi di seluruh dunia menuju liberalisasi dan privatisasi dipicu oleh adanya revolusi teknologi dan komunikasi yang gencar yang disertai kuatnya tekanan dan dorongan lembaga-lembaga internasional

seperti IMF, Untuk meliberalisasi sektor telekomunikasi diseluruh dunia. Lembaga-lembaga ini tanpa henti-hentinya mempromosikan apa yang menjadi keberhasilannya, semisal British Telecom Inggris, dan keberhasilan pemerintah Jepang menswastakan Nippon Telephone&Telegraph (NTT). Negara-negara berkembang lain seperti Chile telah memprivatisasi BUMN sektor telekomunikasinya tahun 1998, Mexico pada tahun 1990, Argentina tahun 1990 dan Venezuela tahun 1992, sedangkan Indonesia pada tahun 1994.

Bagi masyarakat Indonesia, Sektor telekomunikasi merupakan suatu sektor yang paling strategis dan menguntungkan. Itulah mengapa pihak asing sangat gencar melakukan pendekatan terhadap pemerintah kita untuk melaksanakan privatisasi, karena selain pangsa pasar dari sektor telekomunikasi ini sangat potensial, dukungan yang berupa regulasi dari negara bagi para investor sangatlah menjanjikan dan menguntungkan para investor itu.

Saat ini kekuasaan negara dalam mengontrol sumber daya alam dan ekonomi juga tengah dilucuti oleh paham neoliberalisme, yang memperjuangkan kembali berlakunya pasar bebas dan mendesak negara untuk melepaskan kekuasaan mereka atas sumber-sumber ekonomi. Selain itu neoliberalisme juga menginginkan agar negara tidak memproteksi atas berjalannya hukum pasar, negara hanya menciptakan suatu lingkungan yang kondusif demi berlangsungnya pasar bebas. Melalui kampanye privatisasi dan pemotongan subsidi, sangat jelas terlihat bahwa negara tidak mampu lagi melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi untuk melindungi dan memproteksi rakyat, lebih celaknya lagi agar

.....

melakukan reformasi kebijakan dengan cara melakukan amandemen pada konstitusi UUD 1945, serta ditindaklanjuti dengan melakukan reformasi untuk menciptakan produk perundang-undangan baru yang bernafaskan neoliberal,<sup>16</sup> sehingga pada akhirnya ada pertanyaan yang masih tersisa ialah siapakah yang paling diuntungkan dari kebijakan privatisasi ini

Bagaimanapun peran negara tetap merupakan suatu elemen yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi bukan juga sebagai pemberi langsung bagi pertumbuhan, tetapi sebagai mitra, katalisator dan fasilitator. Maka dari itu, negara yang efektif adalah yang memberikan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh rakyat, yang berupa barang dan jasa, serta berbagai regulasi dan perangkat kelembagaan yang mapan sehingga dapat mendorong perkembangan pasar yang baik dan rakyat bisa hidup secara sejahtera dan partisipatif.

---

<sup>16</sup> *Lihat*, Mansour Fakih, hal 125

## **B. Perumusan Masalah**

Privatisasi memang merupakan kebijakan yang sangat kontroversial. Terdapat berbagai celah negatif dari kebijakan ini yang bisa menuju kepada penguatan struktur global dan pelemahan negara atas perannya. Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka pokok permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana relasi neoliberalisme dengan kebijakan privatisasi di Indonesia khususnya pada kasus privatisasi Indosat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Gambaran permasalahan dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi hubungan antara proses neoliberalisme dengan pelaksanaan kebijakan privatisasi di Indonesia khususnya kasus Indosat
2. Ingin mengkaji lebih mendalam tentang proses hegemoni yang dilakukan neoliberal terhadap Indonesia dalam upaya pembentukan sistem ekonomi pasar bebas dengan cara melakukan Privatisasi khususnya kasus Indosat.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Neoliberalisme**

Globalisasi memang telah menuntut minimalisir peran negara. Globalisasi juga mengarahkan kebijakan-kebijakan publik suatu negara yang berorientasi pada tata dunia global yang tunggal dan menyatu. Globalisasi adalah sebuah

... ..

dan Henry Veltmeyer<sup>17</sup> mengeksplorasi globalisasi dengan terlebih dahulu membagi pengertian globalisasi menjadi *deskripsi* dan *preskripsi*. Dalam beroperasinya, globalisasi menuntut peminggiran peran negara dalam proses berekonomi warga negaranya (tata ekonomi ala neoliberal).

Neoliberalisme beranggapan bahwa negara bukan lagi suatu lembaga yang memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, negara hanyalah sebagai lembaga atau badan yang mengurus dan mengusahakan bagaimana perekonomian bisa berjalan dengan lancar melalui berbagai regulasi sebagai penunjang, maka dari itu, neoliberalisme mengatakan bahwa yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat adalah perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) yang bergerak tanpa batas dan yang didukung dengan modal yang besar. MNC-MNC ini mampu menggerakkan roda perekonomian diberbagai belahan dunia ini. MNC-MNC ini dapat membuka suatu lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan penduduk yang berada di tempat beroperasinya MNC tersebut.

Ketika berbicara tentang kapitalisme tidak mungkin kita melewati dan tidak membahas sedikit apa yang menjadi pemikiran Adam Smith terutama yang tertuang dalam bukunya yang sangat terkenal, *The Wealth of Nation*. Smith menempatkan kebebasan, pasar dan kepentingan individu sebagai basis konsep ekonominya dan dari tiga konsep inilah yang kemudian menjadi prinsip fundamental dari kapitalisme. Ada lima prinsip dasar dari kapitalisme yaitu :

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 8-9

1. Kapitalisme adalah pengakuan penuh pada hak milik perorangan atau individu tanpa batas-batas tertentu. Hak milik pribadi adalah jaminan bagi individu yang bersangkutan untuk menegakkan kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan individu akan menjadi suatu kenyataan bila ia dibenarkan untuk mempunyai miliknya sendiri secara terjamin tanpa digugat pihak atau individu lain.
2. Kapitalisme merupakan pengakuan akan hak individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi.
3. Kapitalisme mengisyaratkan pengakuan akan adanya dorongan atau motivasi ekonomi dalam bentuk semangat untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin.
4. Kapitalisme juga memuat pengakuan akan adanya kebebasan melakukan kompetisi dengan individu lain (*freedom for competition*).
5. Kapitalisme mengakui berlakunya hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar bebas.

Pengakuan-pengakuan inilah yang menurutnya disebut sebagai bentuk manifestasi dari konsep *laissez-faire* atau *laissez passer*,<sup>18</sup> yang merupakan inti dari kapitalisme maupun liberalisme. Tenaga penggerak dalam sistem kapitalisme adalah para pemilik kapital atau modal yang memiliki status ekonomi, sosial dan politik yang terhormat dalam sistem.

---

<sup>18</sup> Soefri, *Aspek-Aspek Pembangunan Ekonomi dan Politik*, Yogyakarta, 1980, hal. 100-101.

Apa yang menjadi pendirian neoliberalisme sesungguhnya ditandai dengan karakter sebagai: kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen berkembang, penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrat dan parasit pemerintah yang tidak akan pernah mampu bekerja dengan efektif dan efisien meskipun dikembangkan.<sup>19</sup>

Disinilah persoalan yang dialami oleh Indonesia saat ini, terutama yang terletak pada fungsi dan posisi dari perangkat negara, apabila berhadapan dengan kekuatan arus modal yang menuntut sebuah negara harus tunduk pada kekuatan ini melalui berbagai kebijakan yang alih-alih merupakan saran dari negara-negara pendonor. Sehingga untuk menentukan tujuan, peranan dan arah dalam membuat kebijakan publik yang diharapkan oleh rakyat, pemimpin-pemimpin bangsa ini pun tidak mampu. Apalagi dalam mempertahankan aset-aset yang mampu meningkatkan pendapatan negara serta peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru untuk kesejahteraan rakyat.

## **2. Teori Ketergantungan**

Untuk menjelaskan dan menelusuri secara lebih mendalam permasalahan diatas, tentang bagaimana proses hegemoni neoliberal dalam menerapkan kebijakan privatisasi di Indonesia dengan dalih pemulihan ekonomi, efektivitas dan efisiensi, penulis mencoba melakukan pembacaan fenomena tersebut dengan menggunakan pemikiran dari para pemikir teori ketergantungan.

---

<sup>19</sup> Mansour Fakih juga menuliskan, aturan dasar kaum neoliberal adalah, "liberalisasikan perdagangan dan keuangan, akhiri inflasi, biarkan pasar menentukan harga, lakukan kebijakan

Sepanjang kurun waktu 1970-an, model-model ketergantungan internasional mendapat dukungan yang cukup besar dan pengaruh akademiknya sempat meluas dikalangan intelektual negara-negara Dunia Ketiga. Cepatnya pendekatan ketergantungan tersebut memperoleh sambutan yang nampaknya akibat dari tidak kunjung terwujudnya prediksi model-model pertumbuhan ekonomi bertahap linier dan perubahan struktural. Pada intinya, model-model ketergantungan internasional itu memandang negara-negara Dunia Ketiga sebagai korban kekakuan aneka faktor kelembagaan, politik, dan ekonomi, baik itu yang berskala domestik maupun internasional. Mereka semua telah terjebak ke dalam perangkap ketergantungan (*dependence*) dan dominasi negara-negara kaya. Pendekatan ini sebenarnya terpecah menjadi sejumlah besar aliran, akan tetapi kesemuanya itu dapat di golongkan-golongkan ke dalam tiga aliran pemikiran besar atau induk, yaitu : model ketergantungan neokolonial (*neocolonial dependence model*), model paradigma palsu (*false-paradigm model*), serta tesis pembangunan-dualistik (*dualistic-development thesis*).<sup>20</sup>

Andre Gunder Frank salah seorang dari pemikir teori ketergantungan ini, dalam teorinya mengembangkan kembali konsep dari Raul Prebisch mengenai negara Pusat dan Pinggiran, yang sering diistilahkan sebagai negara-negara metropolis dan negara-negara satelit.<sup>21</sup> Pola hubungan dari ketergantungannya, Prebisch mengemukakannya pada penekanan hanya pada aspek ekonomi saja yaitu, dari persoalan ketimpangan nilai tukar, sementara Frank menekankan

---

<sup>20</sup> MICHAEL P. TODARO, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Edisi Ketujuh, Jakarta, 2000, hal 108.

<sup>21</sup> Negara Pusat, Pinggiran dan negara metropolis dan satelit merupakan suatu hubungan yang saling ketergantungan dimana negara Pusat atau metropolis diwakili oleh negara-negara maju,

bahwa bukan hanya aspek ekonomi melainkan juga aspek politik. Aspek ekonomi politik ini menurut Frank, dibangun melalui modal asing dan kelas-kelas yang berkuasa di negara-negara satelit.

Dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, para pemilik modal di negara-negara metropolis bekerjasama dengan pejabat pemerintah dinegara-negara satelit. Sebagai akibat kerjasama antara modal asing dan pemerintah setempat ini, muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing dan borjuasi lokal, dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Kegiatan ekonomi praktis merupakan kegiatan ekonomi modal asing yang berlokasi di negara satelit. Fungsi kaum borjuasi lokal adalah sebagai mitra junior yang dipakai sebagai payung politik, serta pemberi kemudahan bagi beroperasinya kepentingan modal asing tersebut, melalui kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Kebijakan pemerintah yang didukung oleh borjuasi lokal ini adalah kebijakan yang menghasilkan keterbelakangan, karena kemakmuran bagi rakyat menjadi suatu persoalan yang dikesampingkan.

Frank memperkuat teorinya dengan menjelaskan tiga komponen utama yang menjadi landasan dari teorinya yaitu : (1) modal asing, (2) pemerintah lokal dinegara-negara satelit, dan (3) kaum borjuasinya. Pembangunan hanya terjadi di kalangan mereka. Sedangkan rakyat banyak, yang menjadi tenaga upahan, dirugikan. Maka, ciri-ciri dari perkembangan kapitalisme satelit adalah: (1) kehidupan ekonomi yang tergantung, (2) terjadinya kerjasama antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di negara-negara satelit, (3) terjadinya

ketergantungan antara negara kaya dan negara miskin dinegara-negara satelit.

Sejalan dengan Frank, menurut Mansour Fakih<sup>22</sup> dalam proses penciptaan ketergantungan, salah satu cara yang strategis untuk memaksakan berbagai agenda neoliberal adalah dengan menyertakannya dalam persyaratan pemberian “hutang” lembaga finansial Internasional (Bank Dunia dan IMF) yang dikenal dengan *Structural Adjustment Program* (SAP). *SAP* ini sebagai turunan dari *Letter of Intent* (LoI),<sup>23</sup> dan sebagai resep yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang dalam rangka memulihkan krisis ekonomi di negaranya. *SAP* yang diberlakukan sebagai salah satu persyaratan hutang yang diberikan oleh IMF yang merupakan langkah strategis dalam upaya memasukkan paham neo-liberalisme ke dalam kebijakan-kebijakan perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, negara-negara didunia termasuk Indonesia dipakai untuk mengintegrasikan perekonomian nasional kedalam perekonomian global. Dengan demikian, reformasi kebijakan yang terbungkus ke dalam *SAP* sebenarnya merupakan jalan bagi masuknya aktor-aktor globalisasi dalam melakukan ekspansi produksi, pasar maupun investasi tanpa adanya suatu hambatan. Di seluruh dunia, IMF senantiasa menerapkan kebijakan *SAP* terhadap negara-negara yang mengalami masalah dalam hal keuangan. Negara-negara penerima pinjaman harus melakukan tiga hal yang menjadi poin penting dalam *SAP* yaitu : *Liberalisasi*, *Deregulasi*, dan *Privatisasi*. Ketiga hal ini pada hakekatnya mengacu pada prinsip-prinsip dari paham neoliberalisme. *Deregulasi*, lebih ditujukan sebagai suatu formulasi kebijakan bagi pemerintah dalam rangka mengikuti alur perdagangan global yang mengarah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 9-10

<sup>23</sup> *LoI* adalah penandatanganan kesepakatan yang merupakan persyaratan awal dalam pengucuran

pada perdagangan bebas. Hambatan-hambatan dalam pasar yang berbentuk aturan harus diminimalisir agar pasar dapat berjalan dengan lancar dan kompetitif. Kebijakan ini dilakukan, misalnya dengan memberikan keringanan bea masuk bagi barang-barang impor luar bahkan kalau perlu tarif impor ditekan sampai pada tingkat 0%. *Privatisasi* dalam *SAP* dipahami secara konseptual yaitu dengan menyerahkan urusan yang menyangkut perusahaan (BUMN) sepenuhnya pada sektor swasta dan sebagai suatu upaya dalam memperbaiki kinerja perusahaan (BUMN) yang didalamnya terdapat campur tangan pemerintah yang tentu saja sifatnya sangat birokratis, monopolistik dan jauh dari unsur-unsur kompetisi dan efisiensi, sedangkan *Liberalisasi* perdagangan merupakan suatu cara menghilangkan restriksi-restriksi kualitatif secara progresif. Berbagai bentuk monopoli dihapuskan dalam rangka mewujudkan persaingan yang sehat dan kompetitif. Selain liberalisasi perdagangan, maka sektor finansial perlu didorong lebih liberal dan kian ketat bersaing, agar terwujud efisiensi anggaran.<sup>24</sup> Strategi kongkret yang dilakukan dalam hal ini adalah melakukan pengurangan subsidi kepada beberapa anggaran yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian semua reformasi kebijakan yang dilakukan lebih dimaksudkan sebagai pelicin “jalan” bagi beroperasinya agenda-agenda neoliberal.

### 3. Privatisasi

Kebijakan privatisasi di beberapa negara berkembang khususnya Indonesia, merupakan suatu agenda neoliberal yang terkesan sangat dipaksakan dalam pelaksanaannya, sebagai sebuah agenda yang dipaksakan kebijakan privatisasi

---

<sup>24</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan sampai*

jelas mendapatkan tanggapan yang beragam dari beberapa kalangan, mulai dari konsep awal perumusannya sampai pada implementasinya yang telah jauh menyimpang dari pengertian privatisasi itu sendiri.

Secara lebih spesifik Indra Bastian memaknai privatisasi sebagai perubahan kepemilikan perusahaan Negara menjadi milik swasta (lihat bagan 1).

Bagan 1. Definisi Privatisasi Menurut Akademisi dan Para ahli yang Pro terhadap Privatisasi.<sup>25</sup>

<p><b>Peacock (1930-an)</b> Pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta</p> <p><b>Beesley dan Littlechild (1980-an)</b> Pembentukan perusahaan</p> <p><b>Dunleavy (1980-an)</b> Pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan Negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non publik.</p> <p><b>Clementi (1980-an)</b> Pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta</p> <p><b>Pirie (1980-an)</b> Pemindahan produksi barang dan jasa sektor publik ke sektor swasta</p> <p><b>Posner (1980-an)</b> Berpindahnya pengelolaan perusahaan dari sektor publik ke swasta</p> <p><b>Kay dan Thompson (1970-an)</b> Perubahan hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta</p> <p><b>Shackleton (1970-an)</b> Pemindahan kepemilikan</p> <p><b>Company Act</b> Penjualan yang berkelanjutan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta</p>
---

Sementara itu kelompok kontra-privatisasi ini mengartikan privatisasi sebagai berikut :

1. Menurut Mansour Fakih, Privatisasi sesungguhnya merupakan salah satu ramuan kunci dari sistem ekonomi globalisasi (*corporate-led globalization*) dalam paham neoliberal.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia, teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal. 20-22.

<sup>26</sup> ... ..

2. Merupakan sebuah aksi politik, yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki “nilai intrinsik” sebagai sebuah strategi ekonomi nasional dan tentu tidak menyumbang apapun bagi penciptaan lapangan kerja baru, angka simpanan dan investasi yang lebih tinggi, atau kekuatan-kekuatan produksi baru.<sup>27</sup>
3. Merupakan sebuah keputusan politik penting dimana pengambilan kebijakannya terjadi atas desakan dari suatu sistem ekonomi dunia (global) yang pada ujungnya hanya menimbulkan dampak kemiskinan struktural dinegara yang menerapkan kebijakan ini.<sup>28</sup>
4. Sebagai turunan langsung neoliberalisme, sebuah paham yang menghendaki pembatasan peran negara dan peningkatan peranan pasar dalam penyelenggaraan perekonomian, dan juga merupakan saudara kandung dari penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan, dan liberalisasi sektor perdagangan.<sup>29</sup>

Kay dan Thomson dalam *Privatization: A Policy in Search of Rationale*, menyatakan bahwa privatisasi merupakan alat untuk merubah relasi antara pemerintah dan sektor privat. Sebab, proses privatisasi telah memproduksi kesempatan bagi sektor privat untuk ikut berpartisipasi dalam memproduksi dan menyediakan kebutuhan *public service*.

---

<sup>27</sup> James Petras dan Henry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, hal 169

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 184-185.

<sup>29</sup> Sebagaimana yang dikemukakan Joseph E. Stiglitz bahwa keempat kebijakan tersebut adalah kebijakan yang selama ini dikenal sebagai kebijakan Washington Konsensus, yang dimotori oleh Amerika dan Inggris maka dari itu privatisasi pada dasarnya adalah sebuah proses sistematis untuk mewujudkan ekonomi pasar bebas.

Definisi lain tentang privatisasi datang dari Cho Chang-hyun. Privatisasi menurut Cho Chang-hyun mempunyai tiga definisi dasar. *Pertama*, privatisasi didefinisikan sebagai partisipasi dari sektor privat dalam menyediakan kebutuhan publik. *Kedua*, privatisasi merupakan hubungan kontraktual antara pemerintah dan sektor privat sebagai landasan bagi sebuah ketetapan pelayanan. *Ketiga*, privatisasi merupakan proses pengembangan dari sektor privat agar memperoleh fasilitas dan kesempatan untuk menyediakan pelayanan publik.

Dengan demikian, pelaksanaan privatisasi akan jauh lebih efektif jika terlebih dahulu pemerintah mampu membuat suatu pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah yang kurang tanggap dan terkesan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk melakukan privatisasi dapat membuat suatu negara mengalami kekacauan politik dan kemerosotan ekonomi, yang pada nantinya akan menambah beban rakyat dalam menanggung berbagai permasalahan yang dihasilkan dari pelaksanaan privatisasi tersebut. Sebaliknya, ketika pemerintah kuat dan tanggap terhadap apa yang akan dihasilkan dari pelaksanaan privatisasi dan tanggap dalam melihat sejauh mana kepentingan para pihak-pihak yang bersangkutan bermain, maka pemerintah mampu melumpuhkan proses eksploitasi dalam selubung kebijakan privatisasi yang menjadi agenda neoliberal ini dengan berbagai regulasi yang saling menguntungkan. Bruce Kogut dan Andrew Spiser juga memandang, privatisasi bukan hanya sekedar persoalan perubahan hubungan antara pemerintah dan sektor privat. Lebih dari itu, privatisasi merupakan aksi depolitisasi negara

“... Privatisasi merupakan proses ekonomi politik yang

meredusir dan mempersempit peran negara dalam penyediaan kebutuhan publik.

Negara dalam hal ini hanya sebagai regulator saja.

### **E. Definisi Konsepsional**

Konsep atau pengertian merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Apabila masalah dan teorinya sudah jelas, biasanya dapat diketahui pada fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian.

- Privatisasi adalah agenda sistem ekonomi globalisasi neoliberal yang meliputi proses-proses menuju penguatan sektor swasta, merupakan suatu agenda politik dari neoliberal yang dipaksakan, dan sebagai suatu keputusan politik yang mampu menimbulkan efek ketergantungan melalui dampak kemiskinan struktural yang ditimbulkannya.
- Neo-liberalisme adalah suatu paham ekonomi yang hubungannya dalam penulisan ini adalah sebagai suatu pola hubungan antara tatanan global dan negara yang saling menciptakan ketergantungan, dimana pengupayaan dalam meminimalkan peran negara diambil sebagai sebuah sikap yang harus dilaksanakan, walaupun berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
- Hubungan antara Neoliberalisme dengan pelaksanaan kebijakan Privatisasi adalah suatu hubungan ketergantungan yang jelas terbangun dari sebuah kesepakatan kerjasama antara pemilik modal atau dari negara-negara maju dengan pemerintah setempat, sehingga menghasilkan kebijakan-

## **F. Batasan Permasalahan**

Dalam penelitian ini penulis sengaja membatasi jangkauan permasalahan hanya pada posisi neoliberalisme dalam hal ini terkait dengan proses privatisasi sampai pada pelaksanaan privatisasi, dimana pola hubungan yang dibangun diatas kepentingan modal asing sebagai palang pintu utama pelaksanaan agenda-agenda neoliberalisme ternyata berujung pada suatu kebijakan pemerintah yang sengaja diarahkan untuk melaksanakan program-program dalam agenda neoliberalisme yaitu privatisasi sektor telekomunikasi, khususnya privatisasi Indosat.

### **a. Neoliberalisme**

- Neoliberalisme yang bermain pada tatanan global ini menginginkan penyerahan diri suatu negara sepenuhnya pada kekuatan pasar.
- Dalam proses bekerjanya pasar menurut hukum permintaan dan penawaran, negara tidak dapat ikut sebagai pemain dalam persoalan ekonomi, apalagi dengan alasan mensubsidi atau memproteksi kaum miskin.

### **b. Privatisasi**

- Privatisasi merupakan turunan dari salah satu agenda neoliberalisme yang terkesan dipaksakan dalam implementasinya.
- Kebijakan privatisasi hanya sebagai upaya menjual aset-aset BUMN untuk menutupi anggaran dan memajukan pertumbuhan dan

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif eksploratif.

- a. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diawali dengan mengumpulkan informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang rasional. Masalah yang diungkap dapat disiapkan sebelum pengumpulan data atau informasi berlangsung, akan tetapi data bersifat berkembang dan dapat berubah selama kegiatan penelitian dilakukan.
- b. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.

Ciri-ciri metode deskriptif adalah :

- Memfokuskan pada pemecahan masalah-masalah yang ada saat ini dan masalah-masalah yang aktual.
- Data-data yang didapatkan mula-mula disusun kemudian dijelaskan dan di analisa

- c. Penelitian eksploratif yaitu : metode penelitian yang berusaha menggali atau mengungkapkan sesuatu hal baru yang masih jarang diungkap sebelumnya. Ciri-ciri penelitian eksploratif adalah penelitian penjajakan atau bersifat terbuka, masih mencari cari, pengetahuan peneliti tentang

1.1.1. Penelitian Deskriptif adalah penelitian untuk menjelaskan studi



keabsahan data tersebut, keterkaitan dengan data lainnya, dan kesesuaian dengan tema penulisan, klasifikasi data dilakukan dengan cara membagi data-data ke dalam kategori teori atau bukan.

3. Interpretasi data, berupa penafsiran-penafsiran terhadap apa yang tersirat di dalam rangkaian data yang disajikan, kemudian mencari pola-pola hubungan dan keterkaitan konsep atau fenomena satu sama lain, untuk itu dalam tahap ini peneliti menghubungkan data-data yang telah tersaji dengan bekal teori yang di pakai dalam penelitian ini.
4. Penyimpulan data, dilakukan dengan membuat kesimpulan terhadap penafsiran data.

## **H. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam bab per bab. Setiap babnya terbagi lagi dalam sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan jenis permasalahan yang diteliti, sementara sub-sub babnya, dimaksudkan agar dapat menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara lebih terperinci.

Bab pertama dalam penulisan ini memaparkan kerangka kerja secara garis besar apa yang ada di balik kebijakan neoliberalisme yang berujung pada di privatisasinya sejumlah BUMN yang kemudian mendapat tanggapan keras dari para ahli maupun pakar yang akhirnya menuai kontroversial. Maksud dari kontroversial disini adalah terjadinya sikap pro dan kontra dalam melihat proses

dan arus kemajuan perkembangan ekonomi yang sangat berlawanan dengan kondisi riil yang terjadi pada proses privatisasi tersebut.

Bab kedua akan mengupas mengenai sejarah perkembangan Neoliberalisme baik itu dalam proses lahirnya neoliberalisme sampai pada rumusan yang dihasilkan oleh neoliberalisme ini dan bagaimana kinerja serta pelaksanaannya di beberapa negara yang telah masuk dalam pusaran neoliberalisme ini. Bab kedua dari bagian ini bertujuan untuk memperlihatkan konstelasi neoliberalisme yang bermain di negara-negara yang menjadi ekspansi ekonominya, melalui program-program kesejahteraan yang diusung oleh paham ini dimana salah satu rumusan program kesejahteraannya yang menjadi turunan dari *SAP* adalah privatisasi BUMN.

Bab ketiga akan membahas mengenai pelaksanaan privatisasi di Indonesia dalam skenario neoliberalisme mulai dari apa yang melatar belakangi dilaksanakannya privatisasi BUMN sampai pada hubungan neoliberalisme dan kebijakan privatisasi di Indonesia yang dalam hal ini terjadinya proses pelemahan peran negara. Bab ini juga berisi studi kasus pelaksanaan kebijakan privatisasi secara lebih kasuistik dari analisis di bab-bab sebelumnya. Bab ini dikhususkan pada kasus privatisasi Indosat yang bertugas menjelaskan kesimpangsiuran kebijakan privatisasi secara lebih spesifik.

Sementara pada bab keempat merupakan bagian perangkuman atau penyimpulan dari apa yang menjadi pembahasan di bab-bab sebelumnya. Selain berisi rangkuman dan kesimpulan, bab ini juga akan mengemukakan saran-saran